


Kuasa Agama dalam Ruang Politik Indonesia Ditinjau dari Konsep Relasi Negara-Agama Machiavelli

Hubertus Herianto¹, Robertus Wijanarko²
Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Malang, Indonesia
Email: heriantohubertus@gmail.com¹, yrnang@yahoo.com²

	<i>This is an open-access article under the CC BY-SA license. Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.</i>	
Diterima: 22-05-2023	Direview: 21-11-2023	Publikasi: 30-04-2024

Abstrak

Fokus tulisan ini ialah tentang relasi negara dengan agama dalam ruang politik Indonesia dalam perspektif relasi negara-agama Machiavelli. Relasi agama dengan negara dalam ruang politik Indonesia perlu ditinjau kembali sebab dalam konteks tertentu agama tampak lebih berkuasa daripada negara yang dari sendirinya lebih luas cakupannya. Konsep relasi negara dan agama yang diusung oleh Machiavelli merupakan titik pijak yang digunakan dalam meninjau relasi negara dan agama yang berkembang di Indonesia. Tulisan ini memakai pendekatan kualitatif, disertai dengan analisis kritis atas pemikiran Machiavelli mengenai relasi negara dengan agama dan atas relasi negara dengan agama yang tampak dalam ruang politik Indonesia. Sebagai temuan, tulisan ini menunjukkan bahwa di Indonesia agama tampak lebih besar dari pada negara dalam perpolitikannya. Kuasa agama atas negara terkuak dalam aneka fakta yang terjadi di tengah masyarakat. Kenyataan ini hanya dapat diatasi dengan membendung pengaruh agama dengan mengikuti pemikiran Machiavelli. Agama tidak dihapus dari ruang politik negara Indonesia, melainkan dijadikan sebagai sarana yang dapat mewujudkan kehidupan bersama secara lebih baik sekaligus memperkuat negara.

Kata Kunci: relasi; negara-agama; kekuasaan; ruang politik

Abstract

The focus of this paper is on the relationship between the state and religion in the Indonesian political space from the perspective of Machiavelli's state-religion relationship. The relationship between religion and the state in the Indonesian political space needs to be reviewed because in certain contexts religion appears to be more powerful than the state, which itself is more expansive. Machiavelli's concept of the relationship between the state and religion is the starting point for examining the relationship between the state and religion in Indonesia. This paper uses a qualitative approach accompanied by a critical analysis of Machiavelli's thoughts on the relationship between state and religion and the relationship between state and religion as it appears in the Indonesian political sphere. As a result, this paper shows that in Indonesia, religion seems to be bigger than the state in its politics. The power of religion over the state is evident in various facts that occur in society. This fact can only be overcome by curbing the influence of religion by following Machiavelli's thought. Religion is not removed from the political space of the Indonesian state, but is used as a tool that can achieve a better common life while strengthening the state.

Keywords: relation; state-religion; power; political spere

1. Pendahuluan

Relasi negara dengan agama merupakan persoalan yang tidak pernah tuntas, terutama di negara-negara yang masih kental dengan nuansa agama. Indonesia adalah salah satu di antaranya. Keberadaan negara dan agama menjadi persoalan karena antarkeduanya kerap terjadi benturan dan ketegangan. Benturan ini terutama berkaitan dengan dimensi politik. Fakta utama yang berkaitan dengan hal ini ialah pelibatan isu-isu agama dalam upaya perebutan kekuasaan. Agama melahirkan fenomena-fenomena tragis yang mencederai kehidupan

bernegara, seperti kekerasan berbasis agama, diskriminasi, terorisme, dan lain sebagainya. Dengan demikian agama dalam arti tertentu tidak menjadi solusi dari masalah bersama di tengah masyarakat. Agama menjadi candu yang pada tempat pertama, sebagaimana Karl Marx, tidak membentuk manusia menjadi pribadi yang berjuang untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan bersama melainkan 'meninabobokannya' dalam pengharapan bahwa Tuhan yang disembah mampu memberikan jalan keluar atas berbagai hambatan hidupnya; dan pada tempat kedua dapat mengeksklusifkan diri dalam kelompoknya dan berupaya menghancurkan kelompok lain, bahkan keberadaan negara itu sendiri (Raho, 2012). Akan tetapi perlu diperhatikan, dan sekiranya menjadi pegangan dalam membaca keseluruhan artikel ini, agama pada dirinya sendiri sejatinya baik. Yang membuat agama itu 'ternoda' adalah para penganutnya. Para penganut agama yang memahami secara keliru ajarannya dan atau yang menafsirkan teks-teks suci tanpa melibatkan konteks kerap kelai salah arah dan pada gilirannya melakukan aksi-aksi yang mendatangkan 'bencana' bagi manusia lain: terorisme, diskriminasi, dan lain sebagainya. Para penganut yang 'melahirkan aneka keburukan' inilah yang kemudian membuat agama kerap dinilai mendatangkan keburukan.

Penghancuran negara oleh agama misalnya tampak dalam usaha perwujudan negara Islam di Indonesia atau khilafah. Akan tetapi di balik bias-bias negatifnya, agama juga memiliki sumbangan positif bagi keberlangsungan hidup manusia modern, khususnya dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Dalam studinya Madung menegaskan bahwa di zaman sekularisasi pun agama-agama sesungguhnya tetap berperan aktif dalam membentuk dan menata kehidupan masyarakat. Mengikuti pemikiran Habermas, ia menyatakan bahwa salah satu sumbangan agama terletak pada bangkitnya penghormatan atas harkat dan martabat manusia (Madung, 2011). Eksistensi agama dalam kehidupan bernegara di Indonesia juga memiliki dampak dua arah di atas. Di suatu sisi ia memberi sumbangan yang menjamin kehidupan bersama yang harmonis, akan tetap di lain sisi agama melahirkan konflik, diskriminasi, kekerasan, dan lain sebagainya. Agama mengancam tata hidup bersama Indonesia sebagai sebuah negara. Agama tampak lebih berkuasa daripada negara sebab kekuatannya mampu mengusik negara itu sendiri. Halnya perlu diatasi sebab negara lebih universal perannya di Indonesia ketimbang agama yang tidak hanya tunggal melainkan plural-beragama. Melihat bahaya agama bagi keberadaan dan keberlangsungan negara Indonesia maka relasi antara negara dan agama perlulah ditinjau dan didalami kembali. Peninjauan dan Pendalaman kembali relasi antara negara dan agama ini didasarkan pada gagasan Niccolo Machiavelli (1469-1527) mengenai tema yang sama. Machiavelli merupakan sejarawan, politisi, diplomat, filsuf, humanis dan penulis Italia (Atthahara, 2019). Ia termasuk tokoh Renaissance. Uraian-uraian Machiavelli mengenai relasi negara dan agama bertentangan dengan pemikiran para tokoh medioval yang menempatkan agama, khususnya Gereja Katolik, sebagai yang paling besar. Di zaman abad pertengahan Gereja menempatkan dirinya sebagai yang bebas mengatur negara dan terlibat penuh dalam urusan perpolitikan, semisal kaisar ditunjuk dan dipilih oleh Gereja melalui Paus. Berseberangan dengan arus pemikiran abad pertengahan, Machiavelli menentangahkan bahwa negara tidak boleh dikuasai oleh Gereja (Hardiman, 2004). Tempat agama adalah dalam kekuasaan negara. Agama hanya 'instrumen' yang berfungsi sejauh mempersatukan-mengintegrasikan negara dan menanamkan nasionalisme-patriotisme. Negara yang mengatur agama bukan sebaliknya (Hardiman, 2004). Di sini, Machiavelli tidak menganggap agama sebagai sesuatu yang tidak berguna (*useless*), tidak hendak menghapusnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas ada dua pertanyaan penting yang menjadi sasaran studi ini, yakni bagaimana relasi negara dengan agama menurut Machiavelli? Bagaimana relasi negara dengan agama dalam konteks Indonesia? Apa sumbangan khas atau relevansi pemikiran Machiavelli bagi relasi negara dan agama di Indonesia? Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dan analisis kritis (Strauss & Corbin, 2007) yang bertumpuh pada kegiatan membaca, mendalami, dan menganalisis pelbagai literatur serta fenomena-fenomena yang memiliki kaitan dengan tema yang dibahas. Studi tentang relasi negara dengan agama di Indonesia ini tidak berdiri sendiri. Studi-studi terdahulu berkaitan dengan tema yang sama perlu disimak secara teliti. Hal itu dilakukan karena kajian-kajian tersebut dapat menopang dan memperkuat aneka gagasan mapun data-data yang berhubungan dengan tema relasi agama dan negara di Indonesia. Beberapa studi terdahulu yang patut disimak adalah sebagai berikut. *Pertama*, Nor Hasan dalam *Agama dan Kekuasaan Politik Negara* (Hasan, 2015). Hasan dalam studinya menemukan adanya kesamaan fungsi antara negara dengan agama. Negara berguna untuk menata kehidupan masa kini manusia dan mewujudkan kesejahteraan di sini dan saat ini semetara agama selain memperjuangkan kehidupan yang layak bagi manusia di dunia juga 'menjamin'

kehidupan masa yang akan datang (*eskatologis*). Negara dan agama disimak sebagai dua entitas yang mampu berjalan beriringan tanpa adanya benturan dan pertentangan. Temuan penting lain dalam kajian Hasan ialah bahwa negara seringkali menjadikan agama sebagai sarana yang bertujuan untuk menindas rakyat. Langkah yang diambil negara tersebut juga diafirmasi oleh tokoh agama yang lebih menjadi corong penguasa sehingga agama tidak menjadi terang yang mewujudkan keadilan dalam tata hidup bersama. Hal ini mungkin terjadi, terutama ketika agama dirasuki politik. Sebagai solusi Hasan lebih berpihak pada kecenderungan Barat yang memisahkan negara dengan agama, terkhusus sehubungan dengan politik. Agama mesti terpisah dari politik agar tidak terkooptasi dan disubordinasi. Sebab ketika terkooptasi agama dimungkinkan menjadi 'alat legitimasi' penguasa; agama akan menutup mata ketika ketidakadilan dan ketidakbenaran berseliweran dalam ruang publik. Kendati menarik garis pisah yang tegas antara negara dengan agama, Hasan juga menyatakan bahwa agama dari sendirinya memiliki peran penting dan tak tergantikan, yakni mengoreksi politik agar hakikat sejati politik tetap terpelihara. Ada dualisme agama dalam gagasan Hasan: menginginkan keterpisahan secara tegas negara dan agama sebab agama kerap menjadi corong penguasa yang membuka ruang ketidakadilan sekaligus menganjurkan agama agar berkontribusi pada negara dengan mengajukan kritik dan koreksi atas praktik politik yang berlangsung. Studi Hasan di atas dari sendirinya memiliki kesamaan dengan pokok yang digarap dalam tulisan ini. Halnya terletak pada upaya menjelaskan relasi antara negara dengan agama. Meski demikian, artikel ini tetap memiliki kekhasan tersendiri, yakni secara spesifik melihat relasi negara dengan agama di Indonesia, dimana agama kerap berkuasa atas agama, dalam perspektif relasi negara dengan agama yang dikemukakan Machiavelli.

Kedua, Paulinus Yan Olla dalam uraiannya tentang *Agama dan Negara dalam Masyarakat Plural Indonesia* (Olla, 2017). Olla mengetengahkan bahwa agama, dalam konteks negara plural seperti Indonesia, mesti memiliki sumbangan sosial-politis tersendiri sehingga mampu mewujudkan kehidupan publik yang adil, sejahtera, dan lain sebagainya. Gereja Katolik, yang mendapat perhatian khusus dalam pembahasannya, harus terlibat dalam menciptakan ruang publik dan politik yang menghormati keberagaman sekaligus dalam upaya penjernihan agama-agama sehingga tidak menjadi sumber perpecahan, intoleransi, diskriminasi, dan seterusnya. Pendapat Olla berangkat dari fakta adanya kegaduhan dalam hidup bersama manusia Indonesia sebagai efek dari politik identitas keagamaan. Sehubungan dengan relasi negara dengan agama, Olla menerangkan bahwa negara perlu menghindarkan diri dari godaan melakukan intervensi terlalu jauh ke dalam wilayah-wilayah agama. Sebaliknya agama tetap memiliki sumbangan tersendiri bagi kehidupan negara. Menurutnya rekonstruksi hubungan antara negara dengan agama mutlak perlu. Negara melalui pemerintah dan para pemuka agama-agama mesti bekerja sama agar di satu pihak tidak meminggirkan agama dari ruang publik tetapi di pihak lain tidak menjadikan agama sebagai tunggangan politik. Berbeda dengan Hasan, pandangan Olla lebih moderat. Ia tidak menghendaki garis pisah yang tegas antara negara dengan agama. Olla menekankan agar negara dan agama memasuki wilayahnya sendiri dan tidak terlalu jauh mencampuri urusan entitas lain sekaligus keduanya meski bekerja sama untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang harmonis. Studi Olla memiliki kemiripan dengan tema yang akan dikaji dalam artikel ini. Selain menyangkut tema relasi negara dan agama yang digarap, artikel ini, sebagaimana dilakukan Olla dalam tulisannya, menjadikan Indonesia sebagai *locus*nya. Yang dilihat adalah pola relasi agama dan negara dalam konteks Indonesia. Adapun perbedaannya ialah Olla memfokuskan diri pada keterlibatan Gereja Katolik dalam menciptakan ruang publik yang menghargai keberagaman sementara penulis dalam konteks kuasa agama yang kadangkala tampak lebih besar dari negara; dan penulis meninjau relasi negara dan agama yang ada di Indonesia menurut konsep Machiavelli tentang relasi negara dan agama, sesuatu yang tidak menjadi *concern* Olla. *Ketiga*, studi tentang *Relasi Politik dan Agama di Tengah Ketidakpastian Ideologi* yang dilakukan Maskuri (Maskuri, 2015). Dalam pembahasannya Maskuri menekankan bahwa hubungan antara agama dan negara merupakan topik yang seringkali dibahas, termasuk dalam Islam; ada pendapat bahwa hubungan antara agama dan negara terintegrasi sebagai suatu entitas, dan yang lain menyebutkan bahwa agama dan negara itu hanya simbiosis mutualistik, dan yang lain lagi menegaskan ketidakberkaitan antara agama: keduanya terpisah dan tidak saling intervensi (sekularis-liberalis). Dari antara pandangan umum yang ditemukannya tersebut, Maskuri mengambil sikap tengah-tengah. Ia tidak menempatkan negara dan agama sebagai satu entitas sekaligus tidak memisahkan keduanya sama sekali. Maskuri menekankan agar agama ikut ambil bagian dalam mengawal politik dalam suatu negara. Kajian Maskuri dari sendirinya memiliki keterarahan yang sama dengan focus tulisan ini, yakni menyimak-

menguraikan tentang relasi antara agama dengan negara. Hal yang membedakannya ialah *locus*-nya. Tulisan ini secara khusus melihat relasi agama dan negara di Indonesia, dan meninjaunya menurut konsep relasi negara dan agama Machiavelli.

2. Metode

Pendekatan atau metode yang digunakan dalam menyimak soal kuasa agama dalam ruang politik di Indonesia menurut perspektif konsep relasi negara-agama Machiavelli ialah pembacaan kritis-deskriptif dan analisis kritis-konstruktif. Pada tempat pertama penulis mendalami dan memahami kerangka, alur pikir dan argumentasi Machiavelli mengenai relasi yang seharusnya berlangsung antara negara dengan agama. Telaah atas konsep relasi negara dan agama dalam kacamata Machiavelli dari sendirinya tidak terpisahkan dengan pandangan dan gagasan politiknya. Oleh karena itu pembahasan yang mengerucut pada uraian tentang relasi negara dan agama ala Machiavelli didahului dengan pemaparan atas pemikiran politiknya, terutama yang terdapat dalam buku *Il Principe* (Sang Pangeran). Setelah mengulas secara garis besar pandangan Machiavelli tentang hubungan negara dan agama, dalam artikel ini akan dipresentasikan secara umum mengenai posisi agama dalam ruang politik di Indonesia. Pada bagian ini tentu tidak semuanya akan dibahas. Halnya hanya sejauh 'observasi' dan analisa penulis atas fenomena yang terjadi di tanah air. Fenomena yang ada kemudian dielaborasi dan didialogkan dengan gagasan Machiavelli mengenai relasi agama dan negara untuk menemukan suatu 'alternatif' bagaimana pola hubungan yang ideal dari keduanya dalam rangka membentuk Indonesia yang lebih berkembang dalam pelbagai hal baik. Penjelasan tentang pendekatan atau metode yang digunakan dalam tulisan ini dapat dibandingkan dengan metode deskripsi dan analisis-interpretatif (Ilaa, 2022; bdk. Herianto & Wijanarko, 2022).

3. Hasil dan Pembahasan

a. Biografi Singkat Machiavelli

Antara abad XIV hingga abad XVII gerakan *Renaissance* atau kelahiran kembali mewarnai seluruh Eropa. *Renaissance* merupakan suatu gerakan perubahan yang menjungkirbalikkan realitas dan mengguncangkan kuasa Gereja yang tidak hanya berkecimpung dengan urusan iman dan agama, melainkan merambah dan mendominasi dalam pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Gereja disimak sebagai yang lebih tinggi dari segalanya dan ditempatkan sebagai ukuran kebenaran dan segala sesuatu yang ideal. Pada masa *Renaissance* situasinya berubah total. Periode ini ditandai dengan terlepasnya segala bentuk pemerintahan dari genggamannya Gereja yang sedemikian kuat pada abad pertengahan (*medievale*) yang digelar sebagai *the Dark Age* atau masa gelap dan kelam yang terjadi di Eropa (Abdullah, 2007). *Renaissance* adalah suatu reformasi-transformatif besar-besaran sehubungan dengan kuasa Gereja dari masa sebelumnya. Sepanjang renaissance lahirlah para pemikir dan filosof-filosof ternama di wilayah Eropa. Di Italia, gerakan kelahiran kembali (*Renaissance*) yang mulai berkembang sejak tahun 1300, melahirkan salah satu tokoh penting yang patut disebutkan, yakni Machiavelli (Machivelli, 1996). Meskipun tidak dikategorikan sebagai figur penting dalam dunia filsafat secara umum, ia merupakan salah satu pemikir ulung dalam ranah filsafat politik (Russel, 2007).

Niccolo Machiavelli lahir di Florence, Italia, pada 3 Mei 1469. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Bernardo dan Bartolommea di Stefano Nelli. Ayah Machiavelli berprofesi sebagai seorang pengacara dan bersama ibunya merupakan bagian dari kelas ningrat dinasti tua Florentine. Sejarah hidup dan pemikiran Machiavelli di kemudian hari tidak terpisahkan dari konteks Florence pada masanya. Sewaktu masih muda, Machiavelli menyaksikan sendiri kejayaan Florence. Dalam perkembangan selanjutnya ia juga berhadapan dengan kondisi dan situasi politik Florence yang diwarnai oleh penghianatan, kecurigaan, nafsu untuk berkuasa, dan siasat licik untuk mendapatkan tampuk kekuasaan (Russel, 2007). Pada hemat saya kedua konteks ini sangat memengaruhi pemikiran dan konsep politik Machiavelli yang disajikan dalam *Il Principe*. Halnya didukung pula oleh kenyataan bahwa ia juga ambil bagian dalam pemerintahan pada masanya, terutama sejak tahun 1494 ketika keluarga Medici tersingkir hingga mereka kembali berkuasa pada tahun 1512 (Machiavelli, 2014). Machiavelli wafat pada 21 Juni 1527. Sebagai seorang cerdas yang menaruh perhatian pada dunia politik dan segala hal yang mengitarinya, Machiavelli menghasilkan beberapa karya ternama, di antaranya: *Discorso sopra le cose di Pisa* (1499), *Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati* (1502), *Del modo tenuto dal duca Valentino nell' ammazzare Vitellozo Vitelli, Oliverotto da Fermo* (1502), *Discorso sopra la provizione del danaro* (1502), *Decennale primo* (1506 poema in terza rima), *Ritratti delle cose dell'Alemagna* (1508-1512), *Decennale secondo* (1509), *Ritratti delle cose di*

Francia (1510), Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (1512- 1517), Il Principe (1513), Andria (1517), Mandragola (1518), Della lingua (1514), Clizia (1525), Belfagor arcidiavolo (1515), asino d'oro (1517), Dell'arte della guerra (1519-1520), Discorso sopra il riformare lo stato di Firenze (1520), Sommario delle cose della citta di Lucca (1520), Vita di castruccio Castracani da Lucca (1520), Istorie fiorentine (1520-1525), dan Frammenti storici (1525).

b. Relasi Negara dan Agama Menurut Machiavelli

1) Pandangan Politik Machiavelli dalam *Il Principe*

Pemikiran politik Machiavelli secara garis besar diuraikan dalam karyanya yang termasyur, *Il Principe*. Tujuan atau *telos* politik menurut Machiavelli ialah kesejahteraan rakyat, terwujudnya keadilan dan kedamaian, serta semakin kuat dan kokohnya negara sehingga mampu bertahan dari serangan musuh yang selalu ada sebab manusia dalam dirinya memiliki 'dorongan' kebinatangan yang membuatnya mampu menghancurkan sesamanya manusia demi kepentingannya sendiri. Usaha mewujudkan semua tujuan politik ini, menurut Machiavelli, tidak dapat ditempuh dengan cara lain selain kompetensi para penguasa dalam menjalankan negara yang menempatkan kehormatan dan kebahagiaan negara pada tingkatan tertinggi. Pengedepanan kehormatan dan kebahagiaan negara ini dapat dilakukan dengan segala cara, termasuk kekejaman atau pun penindasan. Moralitas dan etika tidak mendapatkan tempat seharusnya dalam ide-ide politik Machiavelli. Hal ini dapat kita telusuri dalam pernyataan Machiavelli berikut.

Seorang pangeran harus mampu bermain baik sebagai manusia maupun sebagai binatang buas....Sang pangeran harus bisa memakai kedua kodrat itu...yang satu tanpa yang lain tak dapat ada. Dan karena seorang pangeran harus mampu bermain sebagai binatang buas, dia harus mencontoh rubah dan singa; karena singa tak lepas dari jerat dan rubah tak bisa lolos dari serigala. Jadi, dia harus menjadi rubah untuk mengenali jerat, dan menjadi singa untuk menakut-nakuti serigala-serigala. Mereka yang hanya mencontohi singa tidak tahu apa-apa. Seorang penguasa yang cerdas bisa dan karenanya juga tak harus menepati kata-katanya, jika hal itu merugikan dan alasan-alasannya.....mencolok. Andaikata semua manusia baik, nasihat ini tidak ada artinya; tetapi karena tak banyak faedahnya dan kata-kata mereka tak ditepati, untuk mereka kau juga tak perlu menepatinya. Juga seorang pangeran jangan kehabisan alasan baik untuk manis-maniskan pelanggaran janji (Hardiman, 2004).

Ada beberapa poin penting dan utama yang dinyatakan Machiavelli dalam *Il Principe* sehubungan dengan politik (Noer, 1997). *Pertama, Il Principe* atau *Sang Pangeran* harus senantiasa siap untuk berperang. Machiavelli melihat perang sebagai ancaman serius yang dapat mengancam keberlangsungan dan kokohnya suatu negara. Perang di saat yang sama juga memperkecil kemungkinan terbentuknya kehidupan bersama yang dilindungi kesejahteraan dan keadilan sebab yang ada di baliknya adalah penindasan dan kemelaratan. Kesiapsiagaan untuk berperang dalam pandangan Machiavelli dapat kita posisikan sebagai salah satu keutamaan dasar yang harus dimiliki oleh seorang penguasa. Machiavelli menulis sebagai berikut.

Oleh sebab itu, seorang pangeran hendaklah tidak mempunyai tujuan lain, dan tidak menyibukkan diri dalam mempelajari apa-apa, kecuali soal perang, sebab hanya itulah kepandaian yang diperlukan oleh seseorang yang memerintah. Ini merupakan kebajikan benar-benar, yang bukan saja mempertahankan mereka yang dilahirkan sebagai pangeran, melainkan seringkali memungkinkan orang-orang bernasib baik untuk mencapai tingkat pangeran itu. Dan sebaliknya, seseorang akan mendapati bahwa bila pangeran lebih berpikir tentang kemewahan dibanding tentang alat senjata, ia akan kehilangan negaranya. Penyebab utama kehilangan negara itu adalah pandang rendah tentang kepandaian berperang, dan cara untuk memperoleh negara itu ialah dengan menjadikan diri mahir dalam kepandaian tersebut (Noer, 1997).

Pernyataan di atas menunjukkan peran penting kesiapsiagaan untuk berperang dalam mempertahankan negara serta dalam memperoleh dan melanggengkan kekuasaan. Pandangan ini memaksudkan juga kesiapan untuk meredam aneka pemberontakan dalam sebuah negara yang mengancam keberadaan para penguasa dan stabilitas negara. Hal ini dari sendirinya memungkinkan dan 'melegalkan' tindakan kekerasan terhadap warga negara sendiri ketika yang bersangkutan mengancam tata hidup bersama dan kekuasaan.

Kedua, alasan *Sang Pangeran* dipuji atau dicela. Intisari dari poin ini ialah bagaimana sang pangeran atau penguasa menjalankan kekuasaannya, termasuk mengenai sikap-sikap yang

ditampilkannya. Machiavelli menemukan bahwa seorang pangeran yang mendapat kedudukan seringkali berhadapan dengan atau dipuji atau dicela. *“Yang satu misalnya diduga pemarah, yang lain kikir...; yang satu pemberi, yang lain tamak; yang satu kejam, yang lain pengasih; yang satu memegang kata, yang lain tidak dapat dipercaya; yang satu peragu dan lemah, yang lain tegas dan bersemangat; dan seterusnya”* (Noer, 1997). Berhadapan dengan penilaian semacam ini Machiavelli mewanti-wanti agar sang pangeran tidak tunduk begitu saja. Artinya sang pangeran atau para penguasa tidak hanya berbuat baik sebagai pencitraan dan agar ia disukai. Sebaliknya, ia menyarankan sang pangeran untuk melakukan yang tepat dan seharusnya dalam mempertahankan kekuasaan dan negara, termasuk bila melalui kekejaman yang membuatnya dinilai buruk. Machiavelli dalam hal ini tidak melihat perbuatan dalam dirinya sendiri melainkan pada maksud dibalikinya, sebab berbuat baik belum tentu bermaksud baik dan bertindak kejam tidak selalu terarah kepada yang buruk. Machiavelli mendorong sang pangeran untuk melakukan tindakan yang tepat dalam menjaga dan melanggengkan kekuasaan serta negara, baik dengan cara yang baik maupun sebaliknya. Gagasan dan pokok pemikiran seperti ini sudah seharusnya ditolak sebab tujuan baik tidak pernah mensahkan sarana yang buruk. Hanya saja dalam konteks pemikiran Machiavelli halnya dapat dipahami. Sebab tujuannya adalah keamanan dan keutuhan negara.

Ketiga, murah hati dan sikap kikir. Pandangan Machiavelli mengenai murah hati dan kikir berkaitan dengan penyelenggaraan negara oleh sang pangeran. Machiavelli mewanti-wanti agar sang pangeran tidak terbuai dengan sikapnya yang murah hati. Artinya bahwa jika ia telah dikenal murah hati, tidak seharusnya ia bertindak demikian hanya karena menjaga ‘namanya’. Tindakan ini sangat berbahaya sebab atas alasan kemurahan hati, semisal bagi segelintir orang, sang pangeran melakukan segala hal untuk menunjukkan kemurahan hatinya termasuk menindas rakyat dengan pajak yang tinggi. Sikap demikian adalah petaka dan bumerang sebab sang pangeran disukai segelintir orang karena kemurahan hatinya, tetapi dibenci sebagian besar rakyatnya. Konsekuensinya kekuasaan sang pangeran terancam sebab mereka yang menderita akibat pajak akan berjuang untuk menentang raja dan melengserkan kekuasaannya. Mengatasi persoalan yang bermula dari kemurahan hati tak terukur dari sang pangeran, Machiavelli menyarankan para penguasa untuk bersikap kikir demi negara. Machiavelli berkata *‘sang pangeran...hendaknya tidak keberatan bila disebut kikir; pada waktunya ia akan disangka pemurah, bila ternyata dengan menghemat uang yang masuk ke khas negara mencukupi sehingga dengan itu mampu mempertahankan diri terhadap musuh; dengan menjalankan usaha tanpa membebani rakyat, sehingga ia benar-benar pemurah terhadap mereka yang tidak dia ambil sebagian kecil hartanya (=untuk pajak)* (Noer, 1997) Machiavelli mencetuskan konsep ini tidak tanpa alasan. Menurutnya kenyataan menunjukkan bahwa hanya para penguasa kikirilah, dalam arti seperti di atas, yang mampu mempertahankan negara dan kekuasaannya (Bdk. Noer, 1997).

Keempat, kekejaman atau belas kasih: lebih baik dicintai atau ditakuti. Mengenai hal ini Machiavelli tidak menegasikan perbuatan baik dan menyangkal keharusan bahwa seorang pangeran mesti berbelaskasih. Akan tetapi ia tetap membuka ruang bagi pangeran untuk bertindak kejam demi tujuan mulia. *‘Oleh karena itu seorang pangeran jangan risau dengan tuduhan bahwa ia kejam untuk menjaga rakyatnya bersatu dan setia...’* (Noer, 1997). Keputusan sang pangeran untuk bertindak kejam atau memilih belas kasih dengan sendirinya menentukan sikap rakyat kepadanya, apakah ia dicintai atau ditakuti. Mengenai keduanya, Machiavelli menganjurkan agar sang pangeran lebih baik ditakuti. Dasarnya ialah manusia, rakyat, mencintai karena kesukarelaan, sedangkan manusia takut karena kemauan pangeran; sang pangeran mesti berada bergantung dalam apa yang menjadi kekuasaannya (kemungkinan ia ditakuti) ketimbang berada pada kekuasaan orang lain (cinta terhadapnya berada di bawah kekuasaan rakyat karena sukarela) (Noer, 1997). Pandangan ini kemungkinan lahir dari ‘kelonggaran’ yang diberikan Machiavelli pada kekejaman yang mendatangkan keutuhan negara. Kekejaman membuat sang pangeran ditakuti. Keempat konsep politik di atas, bertalian dengan bagaimana penguasa menjalankan kekuasaannya demi keamanan negara, menunjukkan bahwa Machiavelli mengabsolutkan kekuasaan penguasa demi mewujudkan keamanan negara dan kesejahteraan semua serta langgengnya kekuasaan. Seorang pangeran atau penguasa bebas melakukan apa pun untuk mewujudkan semua hal ini, baik dengan tindakan yang dikategorikan sebagai baik maupun yang disimak sebagai kekejaman. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa negara dalam pandangan Machiavelli adalah segalanya sehingga apa pun dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya. Negara melalui penguasa bebas melakukan apa pun dan kepadanya semua tindakan yang dilakukan tertuju. Singkat kata dalam Machiavelli negara adalah

segalanya. Mempertahankan sebuah negara dapat dilakukan dengan cara apa pun, termasuk dengan mengabaikan moralitas yang diajarkan agama pada masa itu, khususnya Gereja.

2) Agama Takluk pada Negara

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, negara dalam pandangan Machiavelli diletakkan sebagai yang paling diutamakan. Pertanyaan yang muncul kemudian ialah bagaimana dengan keberadaan agen-agen sosial yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya agama yang memainkan peranan penting dalam abad-abad sebelumnya? Berkaca pada pemikiran Machiavelli mengenai 'kebesaran' negara maka dapat disimpulkan bahwa agama tidak dilarang namun berperan sejauh menjadi agen kooperatif yang membantu penguasa dalam merealisasikan terbentuknya sebuah negara yang utuh, sejahtera, adil, dan damai. Agama berada di bawah kekuasaan negara dan tidak lebih besar dari padanya. Sang pangeran, Machiavelli menegaskan, harus menjaga dasar-dasar agamanya demi menjaga negara atau wilayah kekuasaannya agar tetap religius, baik atau damai, dan bersatu. Di sini, Machiavelli tidak benar-benar hendak menomorsatukan agama atau menempatkannya dalam posisi terhormat. Agama sebaliknya digunakan sebagai wadah atau sarana politik (politisasi agama) guna mewujudkan kehidupan bernegara yang stabil. Agama bersifat fungsional semata dan oleh karena itu bukan tidak mungkin jika bertentangan dengan negara, keberadaannya bisa saja dilenyapkan. Lebih jauh Machiavelli juga mendorong para penguasa untuk mendukung suatu agama kendati mengajarkan yang salah asalkan dapat mewujudkan kebersatuan dalam hidup bersama. Ia menegaskan *"the princes of a republic, or of a kingdom, should maintain the foundations of the religion they hold; this done, it will be an easy thing to keep their republic religious, and by consequence good and united. And all the things that arise in favor of [that religion], even if they should judge them false, they should favor and magnify"* (para pangeran sebuah republik, atau sebuah kerajaan, harus menjaga dasar-dasar agama yang mereka anut; ini dilakukan, akan mudah untuk menjaga republik mereka tetap religius, dan akibatnya baik dan bersatu. Dan semua hal yang muncul untuk mendukung [agama itu], bahkan jika mereka menilainya salah, mereka harus mendukung dan memperbesar) (Tarcov, 2014).

Penjelasan singkat di atas menunjukkan bahwa dalam filsafat politik Machiavelli agama hanya dijadikan sarana mewujudkan tujuan politik, yakni suatu negara yang utuh, damai, dan bersatu. Agama dengan demikian tidak memiliki pengaruh yang lebih besar dari negara. Ia hanya memiliki peran sejauh menjamin terwujudnya suatu negara yang bebas dari segala hal yang memecah belah dan mengusik kebersatuannya. Pandangan ini dari sendirinya mengarahkan para penguasa untuk 'mempolitisasi' agama dalam merealisasikan tujuan politik *a la* Machiavelli, yakni negara yang bersatu dengan masyarakat yang sejahtera, dan lain sebagainya. Pandangan demikian tidak berarti agama harus dilenyapkan sama sekali dari kehidupan manusia, termasuk dalam ruang sosial-politiknya. Machiavelli sendiri mengatakan bahwa dia tidak menganggap ajaran-ajaran moral dan dogma-dogma agama itu tidak penting, tetapi semua yang ada dalam agama, termasuk yang tidak penting tadi ternyata memiliki fungsi untuk mempersatukan negara (Hardiman, 2004). Bagi Machiavelli agama memiliki sisi pragmatis untuk mengintegrasikan negara dan ia lebih menekankan makna keberadaan agama yang demikian. Pendapat Machiavelli menampilkan corak khas pemikiran *renaissance* yang membawa warna baru dan keluar dari kungkungan agama, terutama Gereja, yang sangat berkuasa pada abad pertengahan.

c. Panorama Kuasa Agama dalam Ruang Politik Indonesia

Suasana dan ruang publik manusia Indonesia tidak terpisahkan dari peran dan kehadiran agama, termasuk dalam ranah politiknya. Halnya tidak dapat dibantah sebab Indonesia dari semula merupakan negara yang menghormati dan mengakui agama serta kepercayaan seperti yang terdapat dalam sila pertama Pancasila 'Ketuhanan Maha Esa'. Peran kuat agama dalam kehidupan bernegara pada akhirnya disalahartikan, khususnya dalam ruang politik, sehingga agama tampak seolah-olah lebih berkuasa dari negara. Agama tidak sungguh-sungguh takluk pada negara, melainkan sebaliknya negara lebih mendengarkan agama dan bahkan didesaknya dalam keadaan tertentu. Hal inilah yang dimaksudkan dengan keberukuasaan agama. Titik fokus fenomena kausa agama yang dilihat di sini ialah politik identitas dan pelbagai gerakan yang diilhaminya, yang mempengaruhi dan bahkan mendesak negara dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan tata hidup bersama. Fenomena politik identitas merupakan salah satu fakta bahwa agama ditampilkan sebagai yang lebih besar dari negara. Politik identitas sebenarnya bukan barang baru. Artinya bahwa halnya telah bertumbuh di Indonesia sejak lama. Hanya saja

arahnya telah berubah. Politik identitas keagamaan dalam konteks dewasa ini lebih mengarah pada situasi disintegrasi bangsa dan pengeliminasian kelompok berbeda. Negara didesak untuk pro gerakan mereka. Di sinilah gerakan politik identitas berbasis agama, politisasi agama, tampak lebih besar dari negara.

Salah satu bentuk politisasi yang selalu dikenang dalam sejarah Indonesia sebagai sebuah bangsa, dan diangkat dalam tulisan ini, ialah yang terjadi pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Hemat saya peristiwa ini, mengulangi apa yang ditekankan Herianto dan Wijanarko dalam 'Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia' merupakan titik kulminasi dari politik identitas berbasis agama di tanah air (Herianto & Wijanarko, 2022). Ahok, dalam kasus PILKADA DKI Jakarta 2017, yang dituduh sebagai penista agama pada 'dikeluarkan' dari kontestasi politik ibu kota. Kasus Ahok di sini menjadi ladang politik praktis tempat para lawannya menyampaikan ajakan yang mereka pahami tentang haramnya kepemimpinan non-muslim dalam Islam (Kurniawan, 2018). Halnya juga diperparah oleh narasi-narasi yang digemakan dalam gerakan 411 dan 212 di Jakarta. Secara sekilas tidak dapat dilihat keterkaitan peristiwa ini dengan relasi agama dan negara yang terjadi dalam ruang politik manusia Indonesia. Akan tetapi bila dikritisi dan ditelisik lebih dalam kita dapat menemukan bahwa agama sangat mempengaruhi keputusan negara sehingga Ahok, karena narasi-narasi dan gerakan-gerakan massa yang sengaja dimobilisasi lawannya, dihukum atau dipenjara sehingga tidak diikutsertakan dalam PILKADA. Sadar atau tidak agama yang disebut sebagai mayoritas mempengaruhi keputusan negara yang demikian.

d. Agama Berada dalam dan di Bawah Kekuasaan Negara: Indonesia Damai dan terarah kepada Kemajuan-Kebaikan

Pola relasi agama dan negara yang terjadi dalam ruang politik di Indonesia tentu saja perlu dikritisi agar menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai. Hal ini semakin penting untuk dilakukan berhadapan dengan realitas keberagaman, khususnya agama, di Indonesia. Agama yang lebih besar dari negara tidak dapat dibiarkan sebab yang beragama mayoritaslah yang diuntungkan sementara umat beragama lain akan semakin dipinggirkan sebagaimana tampak dalam kasus Ahok yang disebutkan secara singkat pada pokok bahasan sebelumnya. Dalam mengkritisi dan mengoreksi pola relasi agama dan negara di Indonesia, di mana agama terlihat lebih besar dari negara dan mempengaruhinya, gagasan Machiavelli dapat menjadi sumbangan solutif. Konsep kuasa negara atas agama yang dianjurkan Machiavelli dapat diterapkan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia, khususnya dalam bidang politik. Melalui hal ini negara akan memutuskan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh suara-suara 'sumbang' dari gerakan politik berbasis agama yang mengancam keutuhan bangsa dan keharmonisan tata hidup bersama.

Cara konkret yang dapat ditempuh dalam mengupayakan perwujudan relasi agama dan negara yang diusulkan Machiavelli ialah dengan mengikuti secara konsisten segala aturan perundang-undangan yang telah dibentuk di Indonesia sebagai sebuah negara sehingga tidak dipengaruhi oleh suara massa yang digerakan berdasarkan agama tertentu dan dengan tujuan memecahbelah. Para penguasa dan pemerintah diajak untuk tetap memegang teguh prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan jalan ini keutuhan dan kesatuan bangsa akan terjaga sebab tidak ada yang merasa tersisihkan dalam kehidupan bersama, misalnya kaum beragama minoritas. Singkat kata penempatan agama sebagai yang ruang lingkupnya berada dalam dan di bawah kekuasaan negara, atau Machiavelli mungkin akan membebasakannya sebagai 'penaklukan' agama di bawah negara, dapat membentuk negara Indonesia yang damai, maju, dan sejahtera. Meski demikian, memosisikan agama di bawah negara, atau kalau mengikuti bahasa-bahasa 'keras' Machiavelli: penaklukan agama oleh negara, yang dimaksudkan tidak berarti bahwa agama harus dilenyapkan sama sekali pengaruhnya dari kehidupan bersama manusia Indonesia, termasuk dalam ranah politik. Sebab bagaimanapun Indonesia adalah bangsa beriman dan agama memiliki sumbangan khas bagi pembentukan manusia Indonesia yang berkarakter. Poin utamanya ialah agama mesti dan sudah seharusnya tidak lebih besar dari negara, tidak memengaruhi negara lebih dari batas-batasnya, dan negara menerima masukan dari agama lalu melihat-mempertimbangkannya sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan didesak sama sekali olehnya. Pemikiran Machiavelli mengenai relasi negara dan agama juga tidak mesti diambil semuanya. Salah satu halnya yang dihindari ialah soal politisasi agama dan penggunaannya hanya untuk mempersatukan negara atau agama diperalat penguasa. Agama dari sendirinya mesti disimak dalam dirinya sendiri, terutama

sumbangan khasnya dalam membentuk moralitas manusia Indonesia. Agama tidak boleh dipisahkan sama sekali dari negara dan tidak juga dilenyapkan.

4. Simpulan

Pandangan Machiavelli mengenai penaklukan agama dalam kekuasaan negara relevan untuk diterapkan di tengah carut marut ruang politik di Indonesia yang kerap ditandai dengan keberadaan agama yang tampak seolah-olah lebih besar dari negara. Melalui pengaplikasian konsep relasi negara dan agama ala Machiavelli agama tidak menampilkan diri sebagai yang lebih besar dari pada negara, melainkan berada dalam kekuasaan negara. Agama tetap dalam koridornya sendiri sembari memberikan masukan-masukan berarti bagi penyelenggaraan negara, termasuk sehubungan dengan ruang politiknya. Meski relevan dan layak untuk diterapkan di Indonesia, konsep relasi agama dan negara yang diusung Machiavelli tidak mesti dipraktikkan seluruhnya, khususnya penempatan agama sebagai 'alat' atau sarana yang mendukung persatuan dan keutuhan negara semata. Agama tetap dihormati dan diakui keberadaan khasnya, dengan sumbangan-sumbangan tak tergantikan dalam membentuk moralitas manusia bangsa Indonesia. Hanya saja agama mesti 'tahu diri' dan tidak memandang negara sebagai yang lebih kecil darinya. Kehadiran agama diterima dengan tangan terbuka dan tidak dipolitikasi sebagaimana dianjurkan Machiavelli. Gema agama hanya berkaitan dengan tanggapan kritisnya atas negara sehingga negara berkembang ke arah yang lebih baik. Agama tidak menegasikan agama. Melalui cara ini, keberadaan agama dalam ruang politik Indonesia tidak lagi menjadi 'sebab kemunculan' persoalan yang dalam kondisi tertentu mengancam kebersatuan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang beragama.

5. Daftar Pustaka

- Abdullah, U. (2007). *Kapitalisme: The Stanic of Ideology*. EL-Moesa Press.
- Atthahara, H. (2019). Perspektif Ideologi dan Kekuasaan dalam Pemikiran Machiavelli. *Jisipol* 4(1): 85–100.
- Hardiman, F., Budi. (2004). *Filsafat Modern: dari Machiavelli Sampai Nietzsche*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan, N. (2015). Agama dan Kekuasaan Politik Negara. *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, 22(2): 298-310.
- Herianto, H., & Robertus, W. (2022). Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(1): 53–64.
- Kurniawan, B. (2018). Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1): 133-154.
- Ilaa, D. T. (2021). Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi." *Filsafat Indonesia*, 4(3): 211-216.
- Machiavelli, N. (1996). *Politik Kerakyatan Menurut Machiavelli (Discorsi)*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Machiavelli, N. (2014). *Sang Pangeran (The Prince)*. PT Elok Media Komputindo.
- Madung, O., G. (2011). Relasi Agama dan Moralitas Masyarakat Postsekular Negara: Telaah Atas Pemikiran Juergen Habermas. *Millah*, 10(2): 249–270.
- Maskuri. (2015). Relasi Politik dan Agama di Tengah Ketidakpastian Ideologi. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 9(1): 83–104.
- Noer, D. (1997). *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Mizan.
- Olla, P., Y. (2017). Agama dan Negara dalam Masyarakat Plural Indonesia dalam *Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama di Ruang Publik Yang Plural*, edited by A. Tjatur Raharso, Paulinus Yan Olla, and Yustinus, 44–56. Widya Sasana Publication.
- Raho, B. (2012). *Agama dalam Perspektif Sosiologi*. Obor.
- Russell, B. (2007). *Sejarah Filsafat Barat*. Pustaka Pelajar.
- Strauss, A., & Juliet, C. (2007) *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar.

Tarcov, N. (2014). Machiavelli ' s Critique of Religion. *Social Sciences*, (1): 193–216.
https://id.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Machiavelli, diakses pada Minggu, 18 Desember 2022, di Malang.